



PERAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DALAM PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Mas'udin
Politeknik Keuangan Negara STAN
masudin@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
07-08-2017

Dinyatakan Diterima
02-11-2017

KATA KUNCI:
Belanja Pemerintah, Kemiskinan

KLASIFIKASI JEL:
H530, I380

ABSTRAK

Poverty reduction is a priority target of GOI. The GOI annually allocates and realizes poverty reduction budget. This study measures the impact of GOI poverty reduction budget, human resource quality, unemployment rate, inequality level, education level, health level, regional minimum wage, and the total population to poverty in Indonesia. This study uses provincial data panel from 2011 s.d 2015. Fixed effect model with robust standard error is used to estimate regression model. The result shows that all the independent variables have significant influence to the level of poverty in Indonesia. Partially, GOI spending interventions through social assistance and capital expenditures, human resource quality, educational levels, and regional minimum wages have significantly influence poverty levels. While other variables include the population, the level of inequality, and the level of health does not affect the level of poverty in Indonesia.

Pengurangan kemiskinan menjadi target prioritas pembangunan Pemerintah Indonesia. Pemerintah setiap tahun mengalokasikan dan merealisasikan anggaran penanggulangan kemiskinan dalam APBN. Studi ini mengkaji realisasi belanja Pemerintah Pusat, kualitas sumber daya manusia, tingkat pengangguran, tingkat ketimpangan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, upah minimum regional, dan jumlah populasi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Studi ini menggunakan data panel Propinsi 2011 s.d 2015. Untuk mengestimasi parameter model regresi menggunakan *fixed effect model* dengan *robust standard error*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel *independent* tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Secara parsial, realisasi belanja bantuan sosial dan belanja modal, kualitas sumberdaya manusia, tingkat pendidikan, dan upah minimum regional berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel lainnya meliputi jumlah populasi, tingkat ketimpangan, dan tingkat kesehatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia mempunyai catatan keberhasilan dalam penurunan tingkat kemiskinan. Data-data dalam lima dasa warsa terakhir menunjukkan hal tersebut. Angka persentase penduduk miskin Indonesia pada tahun 1970 sebesar 60 persen, mengalami penurunan menjadi 28,6 persen pada tahun 1980, dan terus mengalami penurunan menjadi 15,1 persen pada tahun 1990. *Trend* penurunan kemiskinan berlanjut hingga menjelang krisis ekonomi Indonesia. Pada saat krisis ekonomi tingkat kemiskinan Indonesia mengalami peningkatan menjadi 24,2 persen pada tahun 1998 dan 23,43 persen tahun 1999. Jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 1999 sebesar 47,97 juta jiwa. Setelah krisis ekonomi, tingkat kemiskinan Indonesia kembali mengalami *trend* penurunan. Jumlah penduduk miskin menurun signifikan menjadi 28,01 juta jiwa pada tahun 2016, atau sebesar 10,86 persen dari total penduduk Indonesia.

Menurut BPS (2016) penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dalam menghitung garis kemiskinan, metode yang digunakan BPS yaitu dengan penjumlahan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Sedangkan garis kemiskinan non-makanan (GKNM) merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Sejalan dengan *trend* penurunan kemiskinan di tingkat nasional, sebagian besar Propinsi di Indonesia juga menunjukkan *trend* penurunan yang sama. Tingkat kemiskinan di Propinsi Aceh mengalami penurunan dari 19,57 persen pada tahun 2011 menjadi 16,73 persen pada tahun 2016. Tingkat kemiskinan di Sumatera Utara mengalami penurunan dari 11,33 persen pada tahun 2011 menjadi 10,35 persen pada tahun 2016. Tingkat kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari 9,04 persen pada tahun 2011 menjadi 7,09 persen pada tahun 2016. Data menunjukkan dari keseluruhan Propinsi, hanya ada dua Propinsi yang mengalami kenaikan tingkat kemiskinan yaitu Propinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Persentase penduduk miskin di Propinsi Bali mengalami peningkatan 0,05 persen yaitu dari 4,20 persen pada tahun 2011 menjadi 4,25 persen pada tahun 2016. Sedangkan Propinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sebesar 0,96 persen yaitu dari 21,23 persen pada tahun 2011 menjadi 22,19 persen pada tahun 2016.

Tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan disparitas yang lebar antardaerah. Namun, disparitas kemiskinan antardaerah Propinsi menunjukkan semakin konvergen. Pada tahun 2011, persentase penduduk miskin tertinggi di Propinsi Papua sebesar 31,98 persen dan persentase penduduk miskin terendah di Propinsi DKI Jakarta sebesar 3,75 persen sehingga terdapat disparitas 28,23 persen. Dalam tahun 2016 tingkat disparitas kemiskinan tersebut mengecil menjadi 24,79 persen.

Tingkat penurunan kemiskinan antardaerah Provinsi bervariasi. Propinsi Papua Barat mencatatkan tingkat penurunan kemiskinan terbesar dalam periode 2011 s.d 2016 sebesar 6,49 persen, yaitu dari 31,92 persen tahun 2011 menjadi 25,43 persen tahun 2016. Provinsi Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Barat dalam lima tahun terakhir juga menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan yaitu masing-masing sebesar 3,82 persen, 3,44 persen, dan 3,25 persen. Tingkat kemiskinan di Propinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 dan 2016 tetap yaitu sebesar 3,75 persen. Persentase penduduk miskin menurut Propinsi di Indonesia selengkapnya disajikan pada tabel 1.

Riset-riset tentang kemiskinan telah banyak dilakukan. Ginandjar Kartasasmita dalam Nurwati (2008) menyebutkan terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan diantaranya rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian. Sementara itu, Suahasil Nazara dalam Nurwati (2008) menyebutkan terdapat lima faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu; pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur serta lokasi geografis. Sharp (2006) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan, yaitu ketimpangan dalam pendapatan atau kepemilikan sumberdaya, perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia, dan perbedaan akses dalam modal. Teori yang meyakini adanya hubungan antara jumlah penduduk dengan kemiskinan disampaikan oleh Thomas Robert Malthus bahwa jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka suatu saat nanti sumber daya alam akan habis sehingga muncul wabah penyakit, kelaparan dan berbagai macam penderitaan manusia.

Untuk menanggulangi kemiskinan, Pemerintah membentuk Tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) dan menyusun empat strategi dasar yang dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. *Pertama*, menyempurnakan program perlindungan sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (*shocks*) dalam kehidupannya. *Kedua*, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan

Tabel 1 : Persentase Penduduk Miskin
Menurut Propinsi, 2011 dan 2016

No	Propinsi	2011	2016	Perubahan
	Rata-Rata Nasional	12.49	10.86	(1.63)
1	Aceh	19.57	16.73	(2.84)
2	Sumatera Utara	11.33	10.35	(0.98)
3	Sumatera Barat	9.04	7.09	(1.95)
4	Riau	8.47	7.98	(0.49)
5	Jambi	8.65	8.41	(0.24)
6	Sumatera Selatan	14.24	13.54	(0.70)
7	Bengkulu	17.50	17.32	(0.18)
8	Lampung	16.93	14.29	(2.64)
9	Kepulauan Bangka Belitung	5.75	5.22	(0.53)
10	Kepulauan Riau	7.40	5.98	(1.42)
11	DKI Jakarta	3.75	3.75	-
12	Jawa Barat	10.65	8.95	(1.70)
13	Jawa Tengah	15.76	13.27	(2.49)
14	DI Yogyakarta	16.08	13.34	(2.74)
15	Jawa Timur	14.23	12.05	(2.18)
16	Banten	6.32	5.42	(0.90)
17	Bali	4.20	4.25	0.05
18	Nusa Tenggara Barat	19.73	16.48	(3.25)
19	Nusa Tenggara Timur	21.23	22.19	0.96
20	Kalimantan Barat	8.60	7.87	(0.73)
21	Kalimantan Tengah	6.56	5.66	(0.90)
22	Kalimantan Selatan	5.29	4.85	(0.44)
23	Kalimantan Timur	6.77	6.11	(0.66)
24	Sulawesi Utara	8.51	8.34	(0.17)
25	Sulawesi Tengah	15.83	14.45	(1.38)
26	Sulawesi Selatan	10.29	9.40	(0.89)
27	Sulawesi Tenggara	14.56	12.88	(1.68)
28	Gorontalo	18.75	17.72	(1.03)
29	Sulawesi Barat	13.89	11.74	(2.15)
30	Maluku	23.00	19.18	(3.82)
31	Maluku Utara	9.18	6.33	(2.85)
32	Papua Barat	31.92	25.43	(6.49)
33	Papua	31.98	28.54	(3.44)

Sumber : BPS (2016), data diolah

membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (*human capital*). *Ketiga*, pemberdayaan masyarakat miskin guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. *Keempat*, pembangunan inklusif yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat.

Pemerintah menyampaikan bahwa anggarannya dalam APBN dialokasikan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), penciptaan lapangan kerja (*pro job*), pengentasan kemiskinan (*pro poor*), dan kelestarian lingkungan (*pro environment*). Upaya penanggulangan kemiskinan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh kebijakan anggaran yang menunjukkan

keberpihakan pada masyarakat miskin (*pro-poor budget*).

Untuk itu, perlu riset untuk mengkaji realisasi belanja Pemerintah Pusat dalam penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia mengingat tingkat kemiskinan antarpemropinsi mempunyai disparitas yang tinggi namun semakin konvergen. Disamping itu, tingkat penurunan kemiskinan antardaerah Propinsi yang bervariasi. Sejauh manakah realisasi belanja Pemerintah Pusat dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia? Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia?

Bertitik tolak dari pertanyaan penelitian tersebut, tujuan dari riset ini adalah : (1) menganalisis realisasi belanja Pemerintah Pusat dalam penurunan tingkat kemiskinan, (2) untuk menganalisis determinan tingkat penurunan kemiskinan di Indonesia. Manfaat yang diharapkan dari riset ini adalah untuk membuktikan apakah anggaran dalam APBN menunjukkan keberpihakan pada masyarakat miskin.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kemiskinan

Kemiskinan memiliki banyak definisi, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. *Pertama*, dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif. *Kedua* dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural. Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program. Selain itu ada syarat yang juga harus dipenuhi yaitu harus dipahami secara tepat mengenai penyebab kemiskinan itu sendiri di masing-masing komunitas dan daerah/wilayah. Karena penyebab ini tidak lepas dari adanya pengaruh nilai-nilai lokal yang melingkupi kehidupan masyarakatnya. Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi (Nurwati, 2008).

Ukuran kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila

pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relative lebih kaya. Dengan menggunakan ukuran pendapatan, maka keadaan ini disebut sebagai ketimpangan distribusi pendapatan. (Nurwati, 2008).

2.2. Teori Intervensi Pemerintah

Intervensi Pemerintah dalam perekonomian dilakukan karena dua alasan yaitu kegagalan pasar dan redistribusi (Gruber: 2013). Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar gagal dalam mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi (*resources*) secara efisien dan optimal untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Kegagalan pasar tersebut disebabkan antara lain adanya barang publik, kompetisi yang tidak sempurna, informasi yang tidak simetris, dan adanya eksternalitas. Sementara itu, redistribusi pendapatan dapat dilakukan Pemerintah melalui kebijakan baik pendapatan maupun belanja negara. Redistribusi di bidang pendapatan negara dapat dilakukan melalui pengenaan pajak yang progresif. Orang kaya menanggung beban pajak yang lebih besar dibandingkan dengan orang miskin. Redistribusi di bidang belanja negara dilakukan Pemerintah melalui pemberian bantuan sosial dan berbagai subsidi bagi golongan miskin.

Tujuan intervensi Pemerintah dalam perekonomian dijelaskan oleh tiga sudut pandang teori yang berbeda yaitu : *public interest theory*, *capture theory*, dan *public choice theory* (Boyes dalam Usmaliadanti, 2011). Menurut *public interest theory*, intervensi Pemerintah dalam perekonomian ditujukan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Sudut pandang kepentingan publik tersebut yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan Pemerintah. Sementara itu, menurut *capture theory*, intervensi pemerintah terjadi karena adanya *special interest group* yang mendominasi pemerintah, sehingga aktivitas pemerintah ditujukan untuk keuntungan dan memaksimalkan kesejahteraan dari *special interest group* tersebut. Sedangkan dalam *public choice theory*, didasarkan pada kenyataan bahwa Pemerintah tidak lebih merupakan kumpulan dari banyak orang atau individu yang bekerja untuk Pemerintah, dan masing-masing individu mencoba memaksimalkan kepentingannya. Dalam sudut pandang ini Pemerintah adalah sebuah organisasi yang kompleks yang terdiri dari banyak individu, masing-masing dengan tujuan yang berbeda.

Dalam tataran implementasinya, intervensi Pemerintah pusat dalam perekonomian direalisasikan

dalam bentuk belanja negara. Belanja negara diklasifikasikan dalam tiga bentuk yaitu belanja menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Klasifikasi menurut organisasi menunjukkan anggaran belanja negara yang dialokasikan menurut Kementerian/lembaga. Klasifikasi menurut fungsi menunjukkan anggaran belanja negara dialokasikan menurut 11 fungsi pelayanan oleh Pemerintah meliputi fungsi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sedangkan klasifikasi menurut jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, subsidi, hibah, pembayaran bunga utang, dan belanja lain-lain (Bultek No 4, 2006).

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, jenis belanja Pemerintah yang erat kaitannya dengan program penanggulangan kemiskinan adalah bantuan sosial, belanja modal, dan subsidi. Menurut Bultek No.4 (2006), bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dialokasikan untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Subsidi merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/ BUMD dan perusahaan swasta.

2.3. Penelitian-Penelitian Terdahulu

Rusdarti dan Sebayang (2013) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah dan menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), pengangguran, dan belanja publik terhadap kemiskinan. Analisis data menggunakan teknik Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan PDRB dan pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan penurunan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Perolehan hasil estimasi yang cukup menarik dari penelitian ini adalah koefisien belanja publik bernilai positif dan signifikan secara statistik artinya peningkatan belanja publik maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Hal tersebut menunjukkan

masih dominannya belanja operasional/konsumsi pemerintah dengan orientasi belanja pegawai yang semakin tinggi menyebabkan rendahnya prioritas pada pelayanan publik.

Nafziger (1997) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai faktor yang sangat penting yang ikut berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan. Arsenio dkk (2003) menemukan bahwa terdapat keterkaitan kuat antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil dari analisis ekonometriknya menunjukkan bahwa selain pertumbuhan ekonomi, terdapat faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan antara lain infrastruktur, sumber daya manusia, insentif harga pertanian, dan akses terhadap teknologi.

2.4. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori tersebut, hipotesis penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis belanja bantuan sosial dialokasikan Pemerintah untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Patut diduga bahwa realisasi belanja bantuan sosial oleh Pemerintah akan menurunkan tingkat kemiskinan.
2. Secara teoritis belanja modal dialokasikan Pemerintah untuk tujuan penyediaan aset tetap salah satunya berupa infrastruktur. Berdasarkan hal tersebut dan mengacu kepada hasil riset-riset sebelumnya, patut diduga realisasi belanja modal akan menurunkan tingkat kemiskinan.
3. Secara teoritis dan hasil riset-riset sebelumnya, sumberdaya manusia yang berkualitas akan meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Patut diduga peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menurunkan tingkat kemiskinan.
4. Secara teoritis tingkat pendidikan dan derajat kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dan mengacu kepada hasil riset-riset sebelumnya, patut diduga peningkatan tingkat pendidikan dan derajat kesehatan akan menurunkan tingkat kemiskinan.
5. Berdasarkan landasan teoritis dan mengacu kepada hasil riset-riset sebelumnya, patut diduga peningkatan upah minimum regional akan menurunkan tingkat kemiskinan.
6. Berdasarkan landasan teoritis dan mengacu kepada hasil riset-riset sebelumnya, patut diduga penurunan tingkat ketimpangan dan pengangguran akan menurunkan tingkat kemiskinan.
7. Berdasarkan landasan teoritis dan mengacu kepada hasil riset-riset sebelumnya, patut diduga

peningkatan penduduk akan meningkatkan tingkat kemiskinan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Keuangan RI. Jenis data yang digunakan yaitu data panel yang merupakan penggabungan *data time series* (2011 s.d 2015) dan data *cross section* Propinsi. Ruang lingkup studi mencakup seluruh Propinsi di Indonesia, kecuali Propinsi yang baru terbentuk pada periode tersebut yaitu Kalimantan Utara.

3.2. Pengukuran dan Definisi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Tingkat Kemiskinan = f (Belanja Bantuan Sosial APBN, Belanja Modal APBN, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Harapan Hidup, Upah Minimum Regional, Tingkat Pengangguran, Tingkat Ketimpangan, Jumlah Penduduk).

Model Persamaan yang digunakan :

$$TK_t = a + b_1Bansos_{t-1} + b_2Modal_{t-1} + b_3IPM + b_4APS + b_5AHH + b_6UMR + b_7TPT + b_8gini + b_9Populasi + e_i$$

Di mana:

TK_t = Tingkat Kemiskinan

Bansos = Belanja Bantuan Sosial APBN

Modal = Belanja Modal APBN

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

APS = Angka Partisipasi Sekolah

AHH = Angka Harapan Hidup

UMR = Upah Minimum Regional

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

Gini = Tingkat Ketimpangan

Populasi = Jumlah Penduduk

Variabel penelitian dan definisi operasional variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

3.3. Metode Analisis Data

3.3.1. Pemilihan Model dan Metode Estimasi

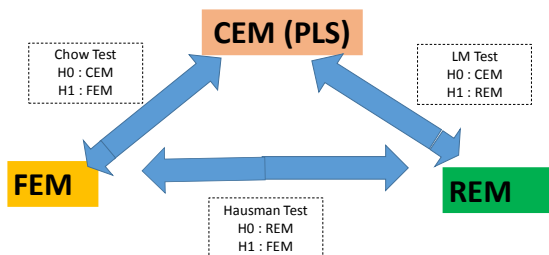
Untuk mengestimasi parameter regresi dengan menggunakan data panel, terdapat tiga pendekatan pemilihan model yaitu : *common effect model* (CEM) atau *pooled least square* (PLS), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM). Dalam memilih salah satu yang paling tepat dari ketiga model tersebut terdapat beberapa pengujian yang dilakukan :

1. *Chow test* merupakan pengujian untuk menentukan model *fixed effect* atau *random*

effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

2. *Hausman test* merupakan pengujian statistik untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan.
3. *Lagrange Multiplier test* (LM) merupakan pengujian untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik dari pada model *common effect*.

Pengujian yang dilakukan dalam rangka menentukan pemilihan model yang paling tepat, digambarkan dalam grafik di bawah ini:



3.3.2. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda terutama yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Jika berdasarkan pengujian metode estimasi didapatkan model yang terpilih yaitu CEM atau FEM, maka terdapat empat asumsi klasik yang harus dilakukan pengujian yaitu multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas. Sementara itu, jika yang terpilih model REM maka terdapat dua asumsi klasik yang harus diuji yaitu multikolinearitas dan normalitas. REM tidak perlu melakukan uji heteroskedastisitas dan autokorelasi karena dalam model estimasinya sudah menggunakan *generalized least square* (GLS).

3.3.3. Pengujian Kesesuaian Model

Salah satu asumsi yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda OLS adalah bahwa model yang digunakan telah dispesifikasi dengan benar. Untuk itu perlu dilakukan pengujian kesesuaian terhadap model yang telah digunakan meliputi uji kesesuaian (*goodness of fit*), uji signifikansi simultan (uji F) dan uji signifikansi parsial (uji T). Uji signifikansi simultan digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas (*independent*) secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat (*dependent*). Jika hasil uji simultan signifikan maka dilanjutkan dengan uji signifikansi parsial, yang dilakukan untuk melihat secara parsial atau per variabel apakah masing-masing variabel bebas secara signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat. Selanjutnya, dilakukan pengujian *goodness of fit* yang digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dari nilai variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi nilai dari variabel bebas.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Pemilihan Model dan Metode Estimasi

Untuk mengestimasi parameter model regresi dengan menggunakan data panel, terdapat tiga pendekatan model yaitu : *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM). Dalam memilih salah satu yang paling tepat dari ketiga model tersebut terdapat beberapa pengujian yang dilakukan yaitu *Chow test*, *Hausman test* dan *Lagrange Multiplier test* (LM).

1. Chow Test

Chow test merupakan pengujian untuk menentukan apakah *Common Effect Model* (CEM) atau *fixed effect model* (FEM) yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam *chow test*, yaitu $H_0 = \text{CEM}$ dan $H_1 = \text{FEM}$. Hasil *Chow test* menunjukkan bahwa nilai probabilitas F sebesar 0,0000, atau kurang dari alfa (5%), yang berarti bahwa H_0 ditolak atau H_1 diterima. Sehingga berdasarkan *chow test* dapat disimpulkan bahwa model yang tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Setelah melakukan *Chow Test* kemudian dilanjutkan dengan *Hausman Test*.

2. Hausman Test

Hausman test merupakan pengujian statistik untuk menentukan apakah *Random Effect Model* (REM) atau *Fixed Effect Model* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam *Hausman test* yaitu $H_0 = \text{REM}$ dan $H_1 = \text{FEM}$. Hasil *Hausman test* menunjukkan bahwa nilai probabilitas F sebesar 0,0000, atau kurang dari alfa (5%), yang berarti bahwa H_0 ditolak atau H_1 diterima. Sehingga berdasarkan *Hausman test* dapat disimpulkan bahwa model yang tepat adalah *Fixed Effect Model*.

Berdasarkan pemilihan model tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengestimasi parameter regresi data panel yang paling tepat dalam studi ini berdasarkan pengujian *Chow Test* dan *Hausman test* adalah *Fixed Effect Model*.

4.2. Pengujian asumsi Klasik

Fixed Effect Model harus memenuhi pengujian asumsi klasik yang meliputi normalitas, non multikolinearitas, non autokorelasi, dan non heteroskedastisitas. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis dalam pengujian normalitas yaitu $H_0 = \text{residual berdistribusi normal}$, dan $H_1 = \text{residual tidak berdistribusi normal}$. Hasil pengujian menunjukkan nilai *P value* dari *combined K-S* sebesar 0,133. *P value* tersebut lebih besar dari alfa (5%) sehingga gagal menolak H_0 , yang berarti bahwa residual berdistribusi normal.

Uji non multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan korelasi parsial yang hasilnya menunjukkan bahwa nilai *partial correlation* antar variabel *independent* kurang dari 0,8. Menurut Gujarati (2004) apabila korelasi antar variabel *independent* kurang dari 0,8 maka model terbebas dari multikolinearitas.

Uji non autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Wooldridge test. Hipotesis dalam pengujian autokorelasi yaitu H_0 = nonautokorelasi, dan H_1 = autokorelasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya ($\text{Prob} > F$) = 0.0095 atau dibawah alfa (5%), sehingga H_0 ditolak. Hal ini mengindikasikan adanya autokorelasi.

Uji non heteroskedastisitas dilakukan dengan *Modified Wald test for groupwise heteroscedasticity*. Hipotesis dalam pengujian heteroskedastisitas yaitu H_0 = non heteroskedastisitas, dan H_1 = heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas ($\text{Prob} > \chi^2$) = 0.0000 atau dibawah alfa (5%), sehingga H_0 ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa adanya masalah heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik tersebut dapat diikhtisarkan bahwa residual berdistribusi normal, dan tidak terdapat multikolinearitas. Namun terdapat permasalahan autokorelasi dan heteroskedastisitas, atau dengan kata lain tidak memenuhi kaidah BLUE (*Best Linear Unbias Estimator*).

Menurut Greene (2004) cara yang bisa digunakan untuk mengatasi adanya heteroskedastisitas adalah memakai metode *weighted least square* yang penaksirannya memberikan pembobot bersifat *least square* atau disebut juga *generalized least square* (GLS). Wooldridge (2008) selanjutnya menyampaikan metode yang digunakan untuk mengatasi masalah autokorelasi adalah dengan *feasible generalized least square* (FGLS). Metode ini menerapkan estimasi *differencing order* pertama atau model AR(1), dan jika masih terkorelasi maka dilanjutkan dengan model AR(2).

Bertrand, Duflo, dan Mullainathan (2003) menyampaikan bahwa permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam *Fixed Effect Model* dapat diselesaikan dengan menggunakan *robust standard errors*. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam *Fixed Effect Model* dapat digunakan dua alternatif solusi yaitu (1) menggunakan *Fixed Effect Model* dengan *Robust Standard Error*, dan (2) menggunakan model FGLS (*Feasible Generalized Least Squares*) dengan *dummy variabel* Propinsi.

A. Fixed Effect Model dengan Robust Standard Error

Hasil pengujian *fixed effect model* dengan *robust standard error* sebagai berikut. Berdasarkan

nilai uji statistik F, semua variabel bebas (*independent*) secara bersama-sama mampu menjelaskan dengan baik variabel *dependen* pada taraf nyata $\alpha = 5\%$. Hasil pengujian ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas ($\text{Prob} > F$) = 0.0000. Nilai tersebut dibawah $\alpha = 5\%$ sehingga H_0 ditolak, yang berarti bahwa variabel *independent* berpengaruh secara simultan terhadap variabel *dependent*.

Setelah melakukan uji simultan maka dilanjutkan dengan uji signifikansi parsial. Uji signifikansi parsial (uji statistik t) dilakukan untuk melihat secara parsial atau pervariabel apakah masing-masing variabel *independent* secara signifikan berpengaruh terhadap variabel *dependent*. Hasil uji signifikansi parsial pada taraf nyata $\alpha = 5\%$ ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 : Hasil Pengujian *Fixed Effect Model* dengan *Robust Standard Error*

Fixed-effects (within) regression		Number of obs	=	165	
Group variable: Kode_Propinsi		Number of groups	=	33	
R-sq:		Obs per group:			
within = 0.5229		min	=	5	
between = 0.0818		avg	=	5.0	
overall = 0.0820		max	=	5	
		F(9,32)	=	12.95	
corr(u_i, Xb) = -0.9368		Prob > F	=	0.0000	
(Std. Err. adjusted for 33 clusters in Kode_Propinsi)					
Kemiskinan_t	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
ln_bansos_apbn_t1	-.761997	.3821467	-1.99	0.055	-1.540404 .0164103
ln_modal_apbn_t1	-.5432508	.1883816	-2.88	0.007	-.9269716 -.1595299
IPM_t	-.5757156	.2153104	-2.67	0.012	-1.014289 -.1371426
APS_t	-.1870989	.0544858	-3.43	0.002	-.2980828 -.0761151
AHH_t	-.070575	.30674	-0.23	0.819	-.695384 .554234
ln_populasi_t	-16.59359	10.06508	-1.65	0.109	-37.0955 3.908313
ln_umr_t	3.147074	.8253775	3.81	0.001	1.465835 4.828313
ln_tpt_agust	.3466758	.3661694	0.95	0.351	-.3991867 1.092538
Gini_t	1.00891	4.239292	0.24	0.813	-7.626245 9.644065
_cons	318.8334	139.4762	2.29	0.029	34.72969 602.9372
sigma_u	18.072429				
sigma_e	.6002292				
rho	.99889815	(fraction of variance due to u_i)			

Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada taraf nyata $\alpha = 5\%$ ditunjukkan oleh nilai $P>|t|$ kurang dari 5%. Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan adalah belanja modal APBN, indeks pembangunan manusia, angka partisipasi sekolah, dan upah minimum regional. Belanja bantuan sosial APBN berpengaruh secara signifikan pada taraf nyata $\alpha = 5,5\%$. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada taraf

nyata $\alpha = 5\%$ adalah variabel angka harapan hidup, populasi, tingkat pengangguran, dan tingkat ketimpangan.

Pengujian *goodness of fit* digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi nilai variabel *dependent* dapat dijelaskan oleh variasi nilai variabel *independent*. Nilai *R square within* sebesar 52,29 persen, artinya variasi variabel *independent* mampu menjelaskan 52,29 persen variasi variabel *dependent*, dan sisanya 47,71% dijelaskan oleh variabel lain.

B. Feasible Generalized Least Squares (FGLS)

Hasil pengujian *Feasible Generalized Least Squares* dengan *dummy variabel* Propinsi sebagai berikut. Berdasarkan nilai uji statistik F, semua variabel bebas (*independent*) secara bersama-sama mampu menjelaskan dengan baik variabel *dependent* pada taraf nyata $\alpha = 5\%$. Hasil pengujian ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas ($\text{Prob} > \text{Chi}^2$) = 0.0000. Nilai tersebut dibawah $\alpha = 5\%$ sehingga H_0 ditolak, yang berarti bahwa variabel *independent* berpengaruh secara simultan terhadap variabel *dependent*.

Setelah melakukan uji simultan maka dilanjutkan dengan uji signifikansi parsial. Uji signifikansi parsial (uji statistik z) dilakukan untuk melihat secara parsial atau per variabel apakah masing-masing variabel *independent* secara signifikan berpengaruh terhadap variabel *dependent*. Hasil uji signifikansi parsial pada taraf nyata $\alpha = 5\%$ ditunjukkan pada Tabel 3.

Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada taraf nyata $\alpha = 5\%$ ditunjukkan oleh nilai $P > |t|$ kurang dari 5%. Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan adalah belanja bantuan sosial APBN, belanja modal APBN, indeks pembangunan manusia, populasi, dan upah minimum regional. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada taraf nyata $\alpha = 5\%$ adalah variabel angka harapan hidup, angka partisipasi sekolah, tingkat pengangguran, dan tingkat ketimpangan.

KESIMPULAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa realisasi belanja bantuan sosial, realisasi belanja modal, kualitas sumberdaya manusia, tingkat pendidikan, dan upah minimum regional berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel lainnya meliputi jumlah populasi, tingkat ketimpangan, dan tingkat kesehatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Tabel 3 : Hasil Pengujian *Generalized Least Squares*

Cross-sectional time-series FGLS regression						
Coefficients: generalized least squares						
Panels: heteroskedastic						
Correlation: common AR(1) coefficient for all panels (-0.0720)						
Estimated covariances	=	33	Number of obs	=	165	
Estimated autocorrelations	=	1	Number of groups	=	33	
Estimated coefficients	=	42	Time periods	=	5	
			Wald chi2(41)	=	40834.11	
			Prob > chi2	=	0.0000	
Kemiskinan_t	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
ln_bansos_apbn_t1	-.4634885	.1780274	-2.60	0.009	-.8124157	-.1145613
ln_modal_apbn_t1	-.6282114	.1205598	-5.21	0.000	-.8645043	-.3919185
IPM_t	-.6292912	.1017544	-6.18	0.000	-.8287261	-.4298563
APS_t	-.0900853	.0695224	-1.30	0.195	-.2263467	.0461761
AHH_t	-.1948311	.172401	-1.13	0.258	-.5327308	.1430686
ln_populasi_t	-9.533846	3.078572	-3.10	0.002	-15.56774	-3.499956
ln_umr_t	2.865536	.3699652	7.75	0.000	2.140417	3.590654
ln_tpt_agust	.2211498	.1892474	1.17	0.243	-.1497682	.5920678
Gini_t	.7304084	1.653771	0.44	0.659	-2.510924	3.971741
Kode_Propinsi						
Aceh	12.67944	.8322787	15.23	0.000	11.04821	14.31068
Banten	9.373789	3.312329	2.83	0.005	2.881743	15.86584
Bengkulu	1.972701	2.364056	0.83	0.404	-2.660764	6.606166
DI Yogyakarta	14.29503	.7172534	19.93	0.000	12.88924	15.70083
DKI Jakarta	14.46139	2.882985	5.02	0.000	8.81084	20.11193
Gorontalo	-4.79901	3.856222	-1.24	0.213	-12.35707	2.759046
Jambi	-1.369995	.7255568	-1.89	0.059	-2.79206	.0520704
Jawa Barat	28.70546	7.657359	3.75	0.000	13.69732	43.71361
Jawa Tengah	31.29181	6.742492	4.64	0.000	18.07677	44.50686
Jawa Timur	29.88863	7.217028	4.14	0.000	15.74352	44.03374
Kalimantan Barat	.3562121	.9446515	0.38	0.706	-1.495271	2.207695
Kalimantan Selatan	-4.242694	.578482	-7.33	0.000	-5.376498	-3.10889
Kalimantan Tengah	-7.153578	1.60504	-4.46	0.000	-10.2994	-4.007758
Kalimantan Timur	2.27263	.6114468	3.72	0.000	1.074217	3.471044
Kepulauan Bangka Belitung	-14.07348	3.427084	-4.11	0.000	-20.79044	-7.356516
Kepulauan Riau	-6.242001	2.530767	-2.47	0.014	-11.20221	-1.281789
Lampung	13.344	2.376004	5.62	0.000	8.687114	18.00088
Maluku	2.439376	2.836917	0.86	0.390	-3.120878	7.999631
Maluku Utara	-14.61254	3.835018	-3.81	0.000	-22.12903	-7.096039
Nusa Tenggara Barat	9.283097	1.174825	7.90	0.000	6.980482	11.58571
Nusa Tenggara Timur	11.96216	1.381243	8.66	0.000	9.254977	14.66935
Papua	9.951431	1.765268	5.64	0.000	6.491569	13.41129
Papua Barat	-1.120696	4.780214	-0.23	0.815	-10.48974	8.24835
Riau	5.408109	1.302272	4.15	0.000	2.855703	7.960515
Sulawesi Barat	-11.59565	3.455484	-3.36	0.001	-18.36828	-4.823028
Sulawesi Selatan	9.83018	2.387248	4.12	0.000	5.15126	14.5091
Sulawesi Tengah	2.435615	1.086956	2.24	0.025	.3052209	4.566009
Sulawesi Tenggara	1.161958	1.545783	0.75	0.452	-1.867721	4.191637
Sulawesi Utara	-3.492807	1.730607	-2.02	0.044	-6.884734	-1.008797
Sumatera Barat	3.273766	.9338017	3.51	0.000	1.443548	5.103984
Sumatera Selatan	11.73124	2.243066	5.23	0.000	7.33491	16.12757
Sumatera Utara	15.32231	3.912532	3.92	0.000	7.653888	22.99073
_cons	207.0211	43.71523	4.74	0.000	121.3409	292.7014

DAFTAR PUSTAKA

- Arsenio M Balisacan, Ernesto M Pernia, & Abuzar Asra (2003), *Revisiting Growth and Poverty Reduction in Indonesia : What do Subnational Data Show ?*, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 39, No 3.
In text reference : (Arsenio dkk, 2003)
- Badan Pusat Statistik (2016), *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia*.
In text reference : (BPS, 2016)
- Bertrand, M., E. Dulo dan S. Mullainathan (2004), *How Much Should We Trust Differences in Differences Estimates?*, Quarterly Journal of Economics, 119(1), 249-275.
In text reference : (Bertrand dkk, 2003)
- Buletin Teknis Nomor 10 Tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, 2011.
In text reference : (Bultek No 10, 2011)
- Buletin Teknis Nomor 4 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, 2006.
In text reference : (Bultek No 4, 2006)
- Nurwati, Nunung (2008), *Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008 : 1 – 11.
In text reference : (Nurwati, 2008).
- Rusdarti dan Lesta Karolina Sebayang (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Economia, Volume 9, Nomor 1, April 2013.
In text reference : (Rusdarti dan Sebayang, 2013).
- Sharp, A.M., Register, C.A., dan Grimes, P.W., (2006). *Economic of Social Issues*. New York: McGraw Hill
- Todaro, M. dan Smith, S. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedepalan. Jakarta: Erlangga.
In text reference : (Todaro dan Smith, 2011)
- TNP2K (2017), *Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, <http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/>, di akses pada 21 Februari 2017
In text reference : (TNP2K, 2011)
- World Bank (2003), *Social Risk Management: The World Bank's Approach to Social Protection in a Globalizing World*.
In-text reference : (World Bank, 2003)
- Yunus, M. (2007). *Creating a World without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism*. New York (USA): Perseus Books Group.
In-text reference : (Yunus, 2007)